

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI JAGUNG PIPIL BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 3/PDT.G/2023/PN JKT.PST.

**Oleh:
WAHYU TRIWIYOGO
E1A018058**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat yang dimana Tergugat hanya memenuhi sebagian dari prestasinya, Penggugat pun memberikan somasi kepada Tergugat namun Tergugat mengabaikannya, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan wanprestasi kepada Tergugat berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang mana hakim tidak mempertimbangkan pPasal 1238 KUHPerdara terkait adanya somasi dalam menjatuhkan putusannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap unsur wanprestasi dalam perjanjian jual beli jagung pipil berdasarkan putusan nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. dan untuk mengetahui akibat hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama, Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat terbukti sah dan benar melakukan Wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, tetapi tidak menjelaskan mengenai unsur wanprestasinya. Menurut Penulis setidaknya terdapat tiga unsur wanprestasi yang telah terpenuhi dalam kasus ini yaitu: adanya perjanjian(jual beli jagung pipil); debitur tidak berprestasi (karena tidak menyerahkan sebagian dari prestasi yakni 502,04 ton jagung pipil); dan telah dinyatakan lalai (somasi Penggugat), namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Adapun mengenai unsur salah, Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya melihat substansi ganti kerugian akibat dari tidak terpenuhinya prestasi dan tidak mempertimbangkan Pasal 1238 KUHPerdara mengenai adanya somasi. Kedua, karena kelalaiannya dalam memenuhi perjanjian maka penulis sependapat dengan hakim dalam putusannya berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara akibat hukum bagi Tergugat diharuskan membayar ganti rugi secara tunai atas kewajiban Tergugat kepada Penggugat senilai Rp. 2.133.670.000,- atas sisa jagung pipil yang tidak diberikan sebanyak 502,04 ton sebagaimana tuntutan ganti kerugian dari Penggugat.

KATA KUNCI : Perjanjian jual beli, Wanprestasi, Ganti rugi.

***Juridical Review of Default in Corn Sale and Purchase Agreement Based on Jakarta Pusat
Court Decision No. 3/PDT.G/2023/PN JKT.PST***

Written By:

WAHYU TRIWIYOGO

E1A018058

ABSTRACT

This research is motivated by the issue of a sale and purchase agreement between the Plaintiff and the Defendant, where the Defendant only partially fulfilled their obligations. The Plaintiff served a Legal Notice, but the Defendant ignored it. Consequently, the panel of judges ruled in favor of the Plaintiff, declaring the Defendant in default under Article 1243 of the Indonesian Civil Code, without considering Article 1238 regarding the Legal Notice. This research aims to analyze the judges' consideration of the elements of default in the corn sale and purchase agreement based on the verdict number 3/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst and to determine the legal consequences.

The research method used is normative juridical with a prescriptive approach. The types and sources of legal materials used in this study are secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research. The data analysis is conducted using a normative qualitative method.

Based on the research findings and discussion, it can be concluded that, first, the panel of judges failed to elaborate on the elements of default in declaring the Defendant in default. However, based on Article 1243 of the Civil Code, the author identified three elements of default that were fulfilled: the existence of a contract (corn sales); the debtor's Default (partial fulfillment of obligations); and the debtor's default (Legal Notice from the Plaintiff), which was ignored. Nevertheless, the judges only considered the substance of compensation for damages resulting from the non-fulfillment of obligations and did not take into account Article 1238 regarding the Legal Notice. Second, due to the Defendant's Default, the author agrees with the judges' decision based on Article 1236 of the Civil Code, which states that the Defendant is obligated to pay compensation in cash to the Plaintiff in the amount of IDR 2,133,670,000 for the remaining corn not delivered, totaling 502.04 tons, as claimed by the Plaintiff.

KEYWORDS: Sale and Purchase Agreement, Default, Compensation.